

## ABSTRAKSI

“...Yang penting masyarakat tahu bahwa kami peduli dan tidak mementingkan diri sendiri...”. Inilah sekilas kalimat terkait dengan pelaporan CSR.

Studi penelitian tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*=*Tanggung Jawab Sosial*) dunia usaha memang banyak dilakukan oleh mahasiswa Strata I, namun yang dibedah lebih banyak soal tata pengelolaan, bukan pelaporannya. Apalagi memang *event-event* diskusi tentang CSR lebih banyak membicarakan kiprah, bukan akuntabilitas. Di sisi lain, bila itu dalam ranah BUMN, akuntabilitas menjadi hal yang tidak boleh terlupakan mengingat dana yang digunakan berperspektif anggaran BUMN yang notabene terdapat unsur penggunaan anggaran negara didalamnya.

Regulasi tentang pelaksanaan CSR di Indonesia memang telah dibuat. Kepmen BUMN 236/2003 dan yang terbaru Kepmen BUMN No 5/2007. Bahkan sejak 20 Juli 2007 telah sah UU no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mewajibkan semua PT (bukan hanya BUMN) melakukan CSR, terlepas dari pro kontra di dalamnya.

Akuntabilitas menjadi fokus utama studi akuntansi tentang CSR. Namun kesungguhan perusahaan untuk mengungkap CSR melalui pelaporan dengan unsur “*fairness*” menjadi sisi lainnya. Kecenderungan perusahaan untuk melaporkan “yang baik-baik” saja juga sering terjadi.

Pilihan studi dengan area PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan Petrokimia Gresik memang bukanlah tiba-tiba. Asumsi yang digunakan bahwa keduanya adalah perusahaan negara sehingga patutlah taat terhadap regulasi yang ada. Mudahkah?? Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada??? Adakah standart baku CSR dan pelaporannya??? Memang tidak semudah itu. Salah seorang profesional BUMN bahkan mengungkap bahwa belum ada standar baku tentang pembuatan laporan CSR. Tak dapat dihindari yang sering muncul adalah pelaporan dengan pola narasi.

Yang menarik kemudian adanya kecenderungan lain, yakni membuat Laporan CSR sesuai dengan kebutuhan kepentingan penyajiannya. *Stakeholder* dan lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhinya. Belum lagi perbedaan nuansa kedaerahan, pemahaman masyarakat, atau bahkan sumberdaya pembuat pelaporannya.

Walau usaha membuat laporan kearah yang baku sudah ada, namun kesederhanaan laporan juga justru banyak diminati. “...Yang penting masyarakat tahu bahwa kami peduli dan tidak mementingkan diri sendiri...”, ujar profesional yang dijumpai peneliti di kantornya. Kalau sudah demikian, realitas lah yang berbicara , termasuk realitas teknis pelaporannya.